

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

No	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Bukti Dukung	Keterangan
1	2025	Indeks Kepatuhan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (indikator untuk Provinsi)	memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukannya, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3848 Tahun	Skala indeks kepatuhan daerah = 	Screenshot hasil penilaian Indeks kepatuhan daerah (E-Perda)	BAGIAN HUKUM
2	2025	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		Tepat atau Tidak Tepat 		BAGIAN HUKUM
3	2025	Percentase Penetapan RanPerda Tahun N		Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N = Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N = x 100%		BAGIAN HUKUM
4	2025	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum	YA/TIDAK 	Putusan pengadilan dan surat keputusan kepala daerah	BAGIAN HUKUM

5	2025	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)	Pemerintah Daerah telah a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016). b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah) terkait kelembagaan perangkat	YA/TIDAK	Copy halaman depan, belakang serta pasal yang menunjukkan bunyi peraturan Perda dan perkada yang diterbitkan	BAGIAN HUKUM
---	------	---	--	----------	-------	--	--------------

Muara Bungo,

2026

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

No	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Bukti Dukung	Keterangan
1.	2025	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penetaraan jabatan)	Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penetaraan jabatan. Data Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi 2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penetaraan jabatan	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda = Jumlah rekomendasi Mendagri = x 100%		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
2.	2025	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N =		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
3.	2025	Keberadaan Mall Pelayanan Publik		Ada atau Tidak		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)

Muara Bungo,

2026

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

No	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Bukti Dukung	Keterangan
1	2025	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu	Untuk penyampaian LKPJ melampirkan Surat Pengantar Penyampaian LKPJ kepada DPRD dan Tanda Terima	BAPPEDA
2	2025	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu 1. Undangan Pembahasan LKPJ : Ada / Tidak Ada 2. Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada 3. Berita Acara : Ada/Tidak Ada 4. Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada 5. Dokumentasi: Ada/Tidak Ada	Untuk Pembahasan LKPJ melampirkan Undangan Pembahasan LKPJ,Risalah - Rapat, Berita Acara, Keputusan DPRD tentang Rekomendasi dan Dokumentasi	BAPPEDA
3	2025	Penyampaian rekomendasi LKPJ provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Untuk Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melampirkan Surat pengantar dan Tanda Terima	BAPPEDA
4	2025	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	Penyampaian Rekomendasi LKPJ -Kab/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Untuk Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kab/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melampirkan Surat pengantar dan Tanda Terima	BAPPEDA

5	2025	Jumlah Program yang	Program-Program yang	Jumlah Program yang		
---	------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

	Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 2023	Mendukung 7 Program Prioritas Nasional	Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 2023 = x 100%	BAPPEDA
6	2025	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	BAPPEDA

Muara Bungo,

2026

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

No	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Bukti Dukung	Keterangan
1.	2025	Percentase Jabatan Struktural yang Terisi		Jabatan Struktural yang terisi (Definitif) = Jabatan Struktural yang ada = $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100\%$		BKPSDMD
2.	2025	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N		Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional = Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional = $\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100\%$		BKPSDMD

Muara Bungo, 2026

KEPALA BKPSDMD
KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.